



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 04/HK.04.1-Kpt/6211 /KPU-Kab/1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355J);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

8. Undang...

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim *Quick Wins*/PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagai berikut :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim *Quick Wins*/PMPRB :

1. Inspektur, bertugas :
 - a. meningkatkan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;

b. melakukan

- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
- c. melakukan Panel;
- d. mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor, bertugas :

- a. melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b. merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
- c. melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal 23 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,**

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CORY PRAMITA SARTIANA



Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau

Nomor : 04/HK.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2019

Tanggal : 23 Januari 2019

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. YULIANA 2. AHMAD NAJARUDIN 3. ROYAN HANAPI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi (RB). 2. memberikan arahan pada TIM dalam pelaksanaan RB
	TIM PELAKSANA 1. ROYAN HANAPI 2. ANDRY WAHYUDI 3. M. ZAINURROHMAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Melaksanakan semua kegiatan Reformasi Birokrasi.
	TIM PENDAMPING 1. YULIANA 2. ANDRY WAHYUDI 3. UJANG SEKO	KETUA ANGGOTA SEKRETARIS	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. RAKHMADI NOR 2. DUKAN CHOIRI 3. ARPEPEN	KASUBBAG UMUM STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksanaan Manajemen Perubahan
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. CORY PRAMITA SARTIANA 2. WIWI NOVIRIANA	KASUBBAG HUKUM STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. ANNISA WULANDARI 2. INDRA JAYA 3. MUHAMAD SAID SAMSIR	KASUBBAG PROGDAT STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Kelembagaan
IV.	TIM PENGUAT TATA LAKSANA 1. AHMAD LUKMAN NOOR 2. YOHANES WIBOWO 3. HENDRA BUDI	KASUBBAG TEKMAS STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Tata Laksana
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. RAKHMADI NOR 2. DUKAN CHOIRI 3. ARPEPEN	KASUBBAG UMUM STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penataan Sistem Manajemen ASN

VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Cory Pramita Sartiana 2. Wiwi Noviriana	KASUBBAG HUKUM STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Pengawasan
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. ANNISA WULANDARI 2. INDRA JAYA 3. MUHAMAD SAID SAMSIR	KASUBBAG PROG DAT STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. AHMAD LUKMAN NOOR 2. YOHANES WIBOWO 3. EKA YULIANA	KASUBBAG TEKMAS STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
IX.	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. UJANG SEKO 2. RAKHMADI NOR 3. CORY PRAMITA SARTIANA	SEKRETARIS KASUBBAG UMUM KASUBBAG HUKUM	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Meningkatkan peran Sekretariat Tim Agen Perubahan 2. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan RB.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,**

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA

- Keterangan:
- 1. Kasubbag : Kepala Sub Bagian
 - 2. Kasubbag Progdats : Kepala Sub Bagian Program dan Data
 - 3. Kasubbag Tekmas : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas